

INTEGRASI OTONOMI DAERAH DENGAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI USULAN UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK BAGI PEMERINTAHAN BARU INDONESIA PASCA-SBY

Studi Kasus: Harmonisasi Kehidupan Masyarakat di Kota Mataram

Jerry Indrawan

Universitas Bung Karno, Jakarta

E-mail: jerry_indrawan18@yahoo.co.id

Diterima: 5-5-2014

Direvisi: 22-7-2014

Disetujui: 24-7-2014

ABSTRACT

Local wisdom has enormous potential in efforts to harmonize social life in almost all regions throughout Indonesia. Local wisdom is an inherent part in Indonesian local culture, where the national culture is a form of local culture spread in the entire archipelago. Strengthening the elements of local wisdom, under the supervision from the local government, surely will be very useful in efforts to prevent conflict and strengthen the spirit of national unity. Local government efforts related to local wisdom in Mataram City are trying to implement local wisdom into various community programs. The programs are intended to create harmony and synchronize between local government vision and mission with other community components. Implementation of local wisdom can create a condition, in which relation between members of a community could be developed in a positive manner. Such condition becomes a good parameter for the establishment of harmony. The elements of local wisdom can be a base for local government to understand local dynamics, so that local public participation is also increasing. If the economy is running well, conflicts will not occur. The purpose of this study is intended as a study to observe local wisdom that will be useful for harmonization of public life in the perspective of conflict resolution. This study is important because harmonization could trigger peace in a society. The research design is descriptive, using qualitative method. The data collection is conducted in three ways, through interviews, field research, and literature study.

Keywords: *Local autonomy, local wisdom, integration, and harmonization*

ABSTRAK

Kearifan lokal memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya-upaya harmonisasi kehidupan masyarakat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Kearifan lokal adalah bagian inheren dalam budaya lokal di Indonesia, di mana budaya nasional kita adalah personifikasi dari budaya-budaya lokal di seluruh Indonesia. Dengan memperkuat elemen-elemen kearifan lokal di dalam kehidupan masyarakat lokal atau daerah, di bawah supervisi pemerintah daerah, tentunya akan sangat berguna dalam upaya-upaya pencegahan konflik dan penguatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah daerah di Kota Mataram telah berusaha mengakomodasi kearifan lokal ke dalam berbagai macam program di masyarakat. Program-program ini ditujukan untuk menciptakan keharmonisan dan menyamakan visi dan misi pemerintah daerah dengan komponen-komponen masyarakat lainnya. Implementasi dari kearifan lokal dapat menciptakan suatu kondisi di mana relasi antaranggota masyarakat menjadi positif. Karena itu, kondisi demikian menjadi parameter bagi terwujudnya harmonisasi. Unsur-unsur kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memahami dinamika lokal sehingga partisipasi publik daerah pun semakin besar. Jika ekonomi berjalan baik dan rakyat sejahtera, otomatis konflik pun tidak terjadi. Studi ini dimaksudkan untuk melihat kearifan lokal yang berguna bagi harmonisasi kehidupan masyarakat dalam perspektif pencegahan konflik. Studi ini penting karena harmonisasi dapat memicu terjadinya perdamaian dalam sebuah masyarakat. Studi ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan.

Kata kunci: *Otonomi daerah, kearifan lokal, integrasi, dan harmonisasi*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 sampai 5 April tahun 2013, penulis berkesempatan melakukan penelitian tentang kearifan lokal dan harmonisasi kehidupan masyarakat di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN), yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Studi *Peace and Conflict Resolution*, Universitas Pertahanan Indonesia pada tanggal 1 April sampai 5 April 2013. Salah satu kota yang memiliki keberagaman dalam kehidupan masyarakatnya adalah Mataram. Di kota ini terdapat beberapa kelompok masyarakat yang berbeda budaya, suku, dan agama yang hidup saling berdampingan. Keberagaman masyarakat ini merupakan realitas kehidupan di Kota Mataram yang harus dihormati, dijaga dan dipelihara demi keutuhan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Penelitian yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Mataram ini, berusaha menggali potensi setempat terkait kearifan lokal yang ada di masyarakat demi mencapai keharmonisan. Keharmonisan kehidupan masyarakat di Mataram sangat penting untuk dijaga, mengingat kota ini didiami oleh masyarakat yang terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya. Selain itu, sebagai ibu kota provinsi, Kota Mataram juga mendapatkan imbas dari daerah lain di NTB yang juga menuntut diperhatikan oleh pemerintah provinsi dan mendapat cakupan berita, baik dalam hal konflik, protes, demonstrasi, maupun paparan kejadian yang ada di daerah.

Tulisan ini akan melihat bagaimana integrasi antara otonomi daerah dan kearifan lokal agar masyarakat daerah mengalami proses pemberdayaan secara holistik dan merata di seluruh wilayah nusantara. Contoh upaya-upaya pemberdayaan, dalam konteks integrasi otonomi daerah dengan kearifan lokal, didapatkan dari penelitian yang penulis lakukan di Kota Mataram tentang kearifan lokal untuk harmonisasi kehidupan masyarakat. Studi ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi lapangan (*field research*), dan studi kepustakaan.

KERANGKA TEORI

Teori yang penulis gunakan adalah teori damai dan teori kearifan lokal. Teori klasik mengenai perdamaian yang diprakarsai Galtung menjelaskan tentang konsep “damai positif dan damai negatif”. Saat ini, kondisi damai yang ada masih didominasi oleh damai yang negatif. Galtung menjelaskan bahwa damai adalah kondisi tanpa kekerasan yang bukan hanya bersifat personal atau langsung, tetapi juga bersifat struktural atau tidak langsung. Galtung juga menekankan bahwa kondisi damai adalah kondisi tanpa kekerasan dan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat (Castro & Galace 2010: 19).

Oleh sebab itu, dalam kondisi damai positif, menurut Galtung, haruslah terdapat hubungan yang baik dan adil dalam semua segi kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun ekologi. Dengan demikian, kekerasan struktural seperti kemiskinan dan kelaparan, kekerasan sosio-kultural seperti rasisme, seksisme, dan intoleransi beragama, ataupun kekerasan ekologi, seperti perusakan alam, polusi, dan konsumsi yang berlebihan menjadi sirna. Kondisi damai positif inilah yang harus diusahakan setelah tercapainya damai negatif, yaitu tidak adanya kekerasan langsung atau fisik, baik makro maupun mikro, seperti peperangan, penyiksaan serta kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan (Castro & Galace 2010:21). Akan tetapi, sekalipun tidak ada kekerasan langsung, eksistensi dari kekerasan struktural yang ada (damai negatif) dapat juga mengakibatkan konflik muncul kembali (*relapse*) dan perdamaian menjadi terganggu (Webel & Galtung 2007: 6).

Manusia hidup berkelompok sebagai suatu kesatuan dan membentuk identitas unik yang membedakan dengan kelompok lain. Meskipun demikian, interaksi yang terjadi dalam hidup bersama dengan kelompok lain dan benturan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang dimiliki antara satu kelompok dan kelompok lainnya tentunya sangat sering terjadi. Benturan ini terjadi karena kebudayaan berlaku mengikuti kekuasaan yang ada (Avruch 1998: 310).

Sementara itu, Huntington lebih menekankan pada nilai-nilai yang dianut masyarakat tertentu selain pelbagai permasalahan seputar ras, etnis,

identitas budaya serta pengelompokan sosial lainnya (Avruch 1998: 305). Benturan atau konflik memang sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif, merugikan dan mengganggu kestabilan walaupun di sisi lain dipercaya memiliki daya positif sebagai sebuah proses menuju perubahan ke arah yang lebih baik sehingga konflik harus diakui keberadaannya, diolah, dikelola, dan diubah menjadi kekuatan yang berguna bagi masyarakat.

Agar harmonisasi kehidupan daerah dapat tercipta dan tetap terjaga, masyarakat memang harus bersikap dan berperilaku arif. Hal ini melibatkan penggunaan akal budi sehingga dari perlakuan-perlakuan tersebut dapat tergambar hasil dari aktivitas budi kita. Akumulasi dari hasil aktivitas budi dalam menyikapi dan memperlakukan lingkungan itulah yang disebut pengetahuan lokal atau kearifan lokal. Kearifan lokal ini menggambarkan cara bersikap manusia, termasuk dalam pengelolaan konflik antar sesamanya. Oleh sebab itu, cara masyarakat berlaku untuk mempertahankan perdamaian yang ada di lingkungannya terkait erat dengan pengaruhnya terhadap negara karena dengan merajut kekohesifan lokal, nasionalisme yang merupakan landasan dasar bela negara dapat terwujud.

Bicara tentang kearifan lokal, Amirrachman (2007: 11) menyebutkan bahwa kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang bertumbuh kembang di dalam sebuah masyarakat serta dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat (Amirrachman 2007: 11). Kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budi (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu, dan dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi sehingga sering kali diartikan sebagai kearifan atau kebijaksanaan (Ridwan 2007: 2).

Lebih lanjut, Ridwan (2007: 3) menyebutkan bahwa terminologi “lokal” pun secara spesifik merujuk pada ruang interaksi terbatas dengan

sistem nilai yang terbatas pula. Ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa dan di dalamnya melibatkan suatu pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya ini disebut *setting*. *Setting* sebagai ruang interaksi membuat seseorang dapat menyusun hubungan berhadapan-hadapan di dalam lingkungannya sehingga akan memproduksi nilai-nilai yang menjadi landasan dalam hubungan sosial serta acuan bagi tingkah laku masyarakat dalam lingkungan tersebut (Ridwan 2007: 3).

Kearifan lokal merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari periode panjang evolusi masyarakat beserta lingkungannya dalam suatu sistem lokal yang dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat ini kemudian menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk dapat hidup bersama secara dinamis dan damai. Dalam hal ini, kearifan lokal tidak sekadar acuan tingkah-laku seseorang, namun mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban (Ridwan 2007: 2–3).

Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh sebab itu, Amirudin mengungkapkan bahwa kearifan lokal pun berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal para elite serta masyarakat yang diayominya sehingga dapat digunakan sebagai landasan pembangunan peradaban masyarakatnya (Ridwan 2007: 3).

Selain itu, kearifan lokal secara praktik merupakan upaya masyarakat untuk melestarikan sumber daya agar dapat terus digunakan untuk menghidupi mereka dan menjaga keseimbangan lingkungan. Hanya saja, proses pembangunan yang bersifat *top-down* telah mengecilkan peran dan fungsi nilai-nilai lokal melalui penerapan berbagai peraturan yang bersumber dari pusat dan lebih mendahulukan kepentingan nasional tanpa memperhatikan kepentingan rakyat di tingkat bawah yang sebenarnya merupakan *stakeholder* utama dari kebijakan yang ada.

Ekses jangka panjang yang sangat terasa dari marginalisasi peran dan fungsi kearifan lokal

dalam proses pembangunan adalah menurunnya daya kreativitas masyarakat dan jiwa kewirausahaan karena masyarakat telah terbiasa pada pola “petunjuk dari atas” atau *top-down*. Implikasi mendasar dari situasi seperti ini adalah terciptanya mentalitas subordinat sehingga menjadi kendala budaya terhadap implementasi berbagai program pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sendiri tidak lagi terbiasa dengan program-program *bottom-up* yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat itu sendiri.

KEARIFAN LOKAL KOTA MATARAM

Kota Mataram adalah representasi Provinsi NTB dalam hal keragaman etnis yang ada, dengan adanya tiga etnis besar di sana, yaitu Sasak, Samawa, dan Mbojo (Aryadi, wawancara 1 April 2013). Keberagaman kelompok etnis dengan adat istiadat serta agama yang berbeda memang tidak menafikan munculnya konflik. Namun, berbagai gesekan yang ada memang perlu dikelola dengan baik agar terjadi kekohesifan dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, apabila benturan yang timbul antara etnis-etnis mayoritas ini dapat teratasi dengan baik, benturan antara mayoritas dan minoritas diharapkan juga dapat ditekan dengan baik.

Sejauh ini, sejumlah gesekan yang ada memang bersifat lokal dan berskala kecil, namun intensitas konflik yang terjadi dapat berimbas pada pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sebagai contoh, adanya gesekan antarmasyarakat yang diakibatkan budaya *nyongkolan* dan *merari*. Keduanya adalah tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Mataram terkait masalah-masalah pernikahan dan pemilihan pasangan (jodoh). Dalam tradisi-tradisi ini, gesekan antarmasyarakat umumnya timbul karena perbedaan pendapat ataupun kepentingan (Puziati, wawancara 2 April 2013).

Pendekatan yang diambil dalam mengatasi konflik pun belum menyentuh akar permasalahan sebenarnya sehingga resolusi konflik yang ada masih dianggap belum memberikan perubahan positif bagi masyarakat. Hal ini karena proses resolusinya masih bersifat umum dan tidak terlalu

menyentuh akar permasalahan. Konsep pendekatan budaya yang berkearifan lokal pun belum terlalu dipraktikkan dengan maksimal. Karena itu, dengan melakukan pendekatan budaya berbasis kearifan lokal yang ada, diharapkan penanganan konflik dapat menjadi lebih holistik dan lebih mengenal ke akar permasalahan sebenarnya demi mencapai keharmonisan dan kondisi damai di dalam masyarakat. Sebagai contoh, kearifan lokal pada masyarakat Sasak dapat dilihat dalam *sesenggak* atau petuah Sasak, antara lain *Solah mum gaweq, solah eam daet, dan bayoq mum gaweq bayoq eam daet* (baik yang dikerjakan maka akan mendapat kebaikan dan buruk yang dikerjakan maka akan mendapatkan keburukan) (Puziati, wawancara 2 April 2013).

Masyarakat diajak memahami bahwa seluruh alam raya diciptakan untuk digunakan oleh manusia dalam melanjutkan evolusinya hingga mencapai tujuan penciptaan. Oleh karena kehidupan makhluk-makhluk Tuhan saling terkait maka bila terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah satunya, makhluk yang berada dalam lingkungan hidup akan ikut terganggu pula. Di sisi lain, ada pula ungkapan *adeq te tao jauq aiq* (supaya kita dapat membawa air) yang mengandung makna bahwa dalam suatu perselisihan yang memanas, seseorang diharapkan mampu menjadi pendingin suasana.

Selain itu, dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat beberapa adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Sasak. Beberapa di antaranya, yaitu *saling jot/perasak* (saling memberi atau mengantarkan makanan); *pesilaq* (saling undang untuk suatu hajatan keluarga); *saling pelangarin* (saling layat jika ada kerabat/sahabat yang meninggal); *saling ayoin* (saling mengunjungi); *saling ajinan* (saling menghormati atau saling menghargai terhadap perbedaan, menghargai adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu); *saling jangoq* (silaturahmi saling menjenguk jika ada di antara sahabat sedang mendapat atau mengalami musibah); *saling bait* (saling ambil-ambilan dalam adat perkawinan); *wales/bales* (saling balas silaturahmi, kunjungan atau (kebaikan) yang pernah terjadi karena kedekatan-persahabatan); *saling tembung/sapak* (saling tegur sapa jika bertemu atau bertatap muka dengan tidak mem-

bedakan suku atau agama); *saling saduq* (saling memercayai dalam pergaulan dan persahabatan, terutama membangun persaudaraan Sasak sejati di antara sesama sanak saudara Sasak dan antarorang Sasak dengan non-Sasak); dan *saling ilingan/peringet* (saling mengingatkan satu sama lain antarsesama kerabat atau sahabat dengan tulus hati demi kebaikan dalam menjamin persaudaraan/silaturahmi). Sikap-sikap ini apabila ditransformasikan secara utuh akan menimbulkan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat suku Sasak (*Laporan Penelitian KKDN 2013: 57–59*).

Sikap-sikap yang membentuk harmonisasi di dalam adat istiadat masyarakat Sasak tersebut relevan dengan keberadaan konsep *Menyama Braya* (menjalin tali persaudaraan) yang dianut masyarakat Bali, yang menyatakan bahwa di dalam segala segi kehidupan, pada hakikatnya adalah cara mempertahankan hidup berdampingan demi membentuk harmoni. Keberadaan *banjar* serta *awig-awig* sebagai entitas sosial pun pada dasarnya adalah perwujudan nilai spiritual yang berfungsi untuk menata perilaku anggota masyarakatnya. Etnis Bali menurut sejarahnya memang tidak bisa dipisahkan dari Lombok, bahkan hingga saat ini keterkaitan pulau Lombok dan Bali memang tidak bisa dimungkiri. Keberadaan etnis Bali di Lombok pun mendapatkan identitas tersendiri, yaitu keberadaan “seribu dewa di pulau seribu masjid” berkenaan dengan perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat Sasak dan masyarakat Bali (Yudana, Sujana, dan Ardhana, wawancara 4 April 2013).

Sementara itu, bagi masyarakat Samawa (*Tau Samawa*) terdapat konsep diri yang selalu mengutamakan rasa *saleng* (saling) dan *ilaq* (harga diri), yang menurut Zulkarnain selalu mengutamakan hidup selaras, serasi, harmonis, dan berkeselamatan dalam hubungannya dengan orang lain. Contohnya dalam hal-hal sebagai berikut: *saleng sakiki* (saling membantu, yaitu secara bersama-sama mengatasi dan memecahkan setiap persoalan yang dihadapi); *saleng pedi* (saling mengasihani, yaitu sikap empati terhadap penderitaan orang lain); *saleng satingi* (saling menghormati, lebih-lebih kepada tamu, siapapun dia); *saleng satotang* (saling mengingatkan satu sama lain); *saleng sadu* (saling percaya yang didasari

oleh rasa malu apabila berbuat curang); *saleng sayang* (yang muncul dari kebiasaan sehari-hari dari rasa saling memercayai); *saleng tulung* (wujud kebiasaan kegotongroyongan dalam masyarakat); *saleng beme* (saling membina diri antara satu dan yang lain); *saleng jango* (saling mengunjungi yang tidak hanya pada saat sakit dan adanya musibah, tetapi setiap saat sebagai wujud rasa saling menyayangi); *saleng santuret* (suasana demokratis dalam dimensi kekeluargaan dan persaudaraan) (Zulkarnain 2010: 20–21).

Bagi etnis Mbojo, sampai saat ini kearifan lokal yang masih berkembang dan diyakini, antara lain “*maja labo dahu*” yang artinya malu dan takut. Makna yang terkandung adalah sebagai manusia harus memiliki perasaan malu dan takut dalam melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama dan hukum. Ada juga sumpah “*ngaha dana*”, artinya bagi yang bohong akan mati lebih dahulu dan jasadnya tidak diterima oleh tanah dan Allah Swt. Sumpah pemutus ini tidak hanya mengenai mereka yang bersumpah, tetapi berakibat pada keturunan-keturunan selanjutnya. Sumpah ini dilakukan ketika ada persoalan tanah sengketa.

Dou Mbojo sebutan bagi etnis Mbojo yang berarti orang Mbojo (Bima dan Dompu) memiliki hubungan kekerabatan yang begitu kuat dan mengikat sesama etnis. Budaya merantau yang dimiliki oleh etnis Mbojo dengan memegang *patu* (peribahasa) *maja labo dahu*, mampu menjadi pelekat antara etnis Mbojo di mana pun berada. *Ederu nahu sura dou labo dana* merupakan ungkapan yang menggambarkan identitas dan bentuk kepribadian pemimpin terhadap masyarakat dan daerahnya. Gaya kepemimpinan pada etnis Mbojo digambarkan dalam *Patu* (ungkapan peribahasa Bima) yang berbentuk nasihat massa bagi elite, yaitu sebagai berikut: *ai na Kani Ilmu mbia Oo* (jangan pakai ilmu belah bambu), *ma ese di hanta* (yang di atas diangkat), dan *ma awa di tonda* (yang di bawah diinjak-injak) (Saleh, wawancara 1 April 2013).

Kelekatan hubungan antarmasyarakat yang diikat oleh kesatuan sistem adat, budaya, dan bahasa (bahasa Mbojo) serta hubungan yang begitu dekat dengan elite menjadi faktor yang memperkuat politik identitas pada etnis Mbojo (Bima dan Dompu). Hal ini akan bermakna posi-

tif dalam upaya pelestarian kekayaan khazanah kearifan lokal, namun juga akan bermakna negatif jika konsolidasi massa politik dilakukan dengan sentimen politik identitas.

Melihat beragamnya kearifan lokal suku Sasak, Samawa, dan Mbojo, kearifan lokal terbukti masih sangat terkait dengan nilai-nilai tradisional, dan umumnya masih dipraktikkan di dalam keluarga. Di NTB, bahkan di Kota Mataram sendiri, keberadaan kelompok etnis yang terkotak-kotak sangatlah mungkin menjadi lahan subur warisan stigma konflik sebagai akibat dari keeratan emosional antarkeluarga sehingga menimbulkan sikap pembelaan yang berlebihan. Hal semacam itulah yang perlu dikelola agar benturan yang ada tidak meluas menjadi konflik sosial yang berdampak luas pada masyarakat.

Oleh karena itu, mutlak perlu adanya suatu edukasi yang bisa dilaksanakan secara informal kepada para orang tua untuk tidak mewariskan budaya stigma konflik pada anak-anaknya. Kearifan lokal yang ada dan sudah tertanam harus dioptimalisasikan sedemikian rupa untuk mencegah munculnya konflik. Di samping itu, peran pemuka adat juga mutlak diperlukan untuk menanamkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang santun, toleran, dan saling membantu antarmasyarakat. Hal semacam ini perlu pula mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah dalam program dan kebijakan yang ada, seperti Program Keserasian Sosial yang mengupayakan terjadinya saling pemahaman antarkelompok etnis yang ada di NTB sehingga mampu menjadi landasan kehidupan sosial, termasuk mencegah konflik antarwarga yang sering terjadi.

Menghidupkan kembali nilai kearifan lokal diperlukan agar sikap saling menghormati yang ada di dalam masyarakat dapat terbangun kembali, seperti yang telah berlangsung pada masyarakat Ketare dengan keberadaan makam “Raja Batu Dende” yang sangat dihormati karena dianggap sebagai sumber kehidupan masyarakat setempat. Di komplek makam tersebut terdapat dua batu nisan, yang satu sering didatangi oleh umat Muslim, dan satunya lagi didatangi oleh umat Hindu. Artinya, nilai solidaritas, perkawanan, dan saling menerima di masyarakat Ketare sudah ada sejak zaman dahulu.

Selain keberadaan tempat semacam di atas, kearifan lokal yang berpotensi mempererat persaudaraan warga sekitar adalah nilai “*Likat Nyalah*” yang maknanya malu jika diketahui ada konflik atau melakukan tindakan destruktif terhadap kelompok lain. Walaupun demikian, nilai yang baik ini sudah mulai tergerus sehingga peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberdayakan kembali nilai semacam ini perlu dioptimalkan untuk mencegah terjadinya gesekan.

UPAYA HARMONISASI KOTA MATARAM OLEH PEMERINTAH DAERAH

Di Kota Mataram, suku Sasak adalah masyarakat yang paling besar jumlahnya dan agama yang paling banyak dianut adalah Islam. Secara umum, hubungan antara anggota masyarakat berjalan dengan baik, demikian pula hubungan antara masyarakat dengan pihak Pemerintah Kota Mataram. Selalu terjalin komunikasi dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat seperti adanya pembinaan terhadap pecalang, pengamanan dalam kegiatan-kegiatan adat, dan berbagai kerja sama lain yang melibatkan kedua belah pihak. *Pecalang* adalah perangkat keamanan yang hadir di setiap desa adat yang secara tradisi diwarisi turun-temurun dalam budaya Bali (Pandebaik 2011). *Pecalang* bertugas untuk mengamankan dan menertibkan desa adat, baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Hal ini juga terjadi dengan kelompok-kelompok tertentu yang mewakili kelompok-kelompok masyarakat yang ada.

Bahkan dalam beberapa hal, pemerintah senantiasa mengajak dan mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan pelaksanaan pemerintahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kota Mataram termasuk dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat (*Laporan Penelitian KKDN 2013: 51*). Hal ini sejalan dengan salah satu strategi dasar untuk menjaga pelaksanaan otonomi daerah berjalan, yaitu adanya kontrol publik sebagai bentuk nyata dari partisipasi masyarakat. Otonomisasi merupakan bagian dari demokratisasi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat daerah.

Hal ini menuntut prasyarat yang berat, terutama menyangkut perubahan pola pikir masyarakat agar tidak lagi hanya sebagai penonton, tetapi harus siap menjadi peran utama dalam proses pembangunan nasional (Basuni 2001: 8).

Pemerintah daerah di Kota Mataram telah berusaha mengkomodasi kearifan lokal ke dalam berbagai macam program di masyarakat. Program-program ini ditujukan untuk menciptakan keharmonisan dan menyamakan visi dan misi pemerintah daerah dengan komponen-komponen masyarakat lainnya (*Laporan Penelitian KKDN* 2013: 81). Kuatnya pemerintahan di daerah juga juga ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Aspirasi dan partisipasi politik rakyat di daerah terartikulasi dengan efektif serta benar-benar menjadi paradigma dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik secara proporsional. Terjadi pencerahan demokrasi rakyat, rakyat percaya, senang dan puas serta mendukung penyelenggaraan pemerintahnya. Hal ini terjadi atas dasar kredibilitas dan kinerja pemerintahan yang bersih. Rakyat merasa bahwa pemerintahan adalah miliknya, merasa terlibat di dalamnya, dan juga merasa bahwa pemerintah mengayominya (Nihin 1999: 21).

Dalam mendorong adanya interaksi antara masyarakat dan pemerintah, forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) merupakan forum daerah yang cukup signifikan. Forum ini penting dalam membangun hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait upaya membangun hubungan antara masyarakat dan Pemerintah Kota Mataram. Salah satu di antaranya adalah keseriusan dalam membentuk, menjaga, dan memelihara interaksi antara kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah.

Terkait dengan keberadaan kearifan lokal yang ada, terungkap bahwa pada dasarnya kelompok-kelompok yang ada mengetahui tentang keberadaan kearifan lokal yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh agama, adat dan masyarakat dapat mengungkapkan dan menjelaskan beberapa bentuk kearifan lokal yang ada dan memberikan pandangan dan sikap mereka terhadap keberadaan kearifan lokal tersebut. Karena itu, keberadaan kearifan lokal sendiri bagi

aparatur keamanan sangat penting dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang diimplementasikan dalam keterlibatan para pengamanan swakarsa yang ada. Beberapa organisasi pengamanan swakarsa yang ada di Mataram, seperti Pecalang, Lang-Lang, Banyu Mandala, Persatuan Pemuda Taman Mandala, Nyiurlembang, dan lain-lain, memiliki peran yang cukup penting. Organisasi pam swakarsa ini merupakan bagian dari kearifan lokal suatu agama. Sebagai contoh, pecalang adalah organisasi bentukan agama Hindu, sedangkan Taman Mandala adalah bentukan masyarakat adat Sasak. Keberadaan organisasi seperti ini sedikit banyak membantu usaha-usaha pertahanan dan keamanan negara meskipun dalam skala kecil (Wisnujati, wawancara 3 April 2013).

UUD 1945 Pasal 30 menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oleh karena itu, tugas dan kewajiban warga negara, termasuk pemerintah daerah adalah untuk mendukung alat negara, baik dalam mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan, serta kedaulatan negara. Keterbatasan pranata hankam dalam menjalankan fungsi pengembangan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, mengingat kondisi geopolitik Indonesia yang kompleks, tentu harus mendorong adanya prakarsa dan inovasi, baik dari rakyat maupun pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menggalang sumber daya guna meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi hankam (Noor 2012: 49–50).

Selain itu, dalam rangka menumbuhkan kondisi harmonis di Lombok, pemerintah daerah telah berupaya melalui berbagai langkah positif yang dilaksanakan secara paralel. Langkah pertama yang diambil Pemerintah Daerah Kota Mataram adalah mengupayakan forum komunikasi antarumat beragama (FKUB) yang berada di bawah koordinasi kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri). Mengupayakan deteksi dini terhadap gejala konflik menjadi prioritas Kesbangpoldagri selain sosialisasi turun ke desa-desa dalam rangka safari kunjungan kerja (Wisnujati, wawancara 3 April 2013).

Forum ini adalah bentukan walikota, dan menurut penulis memiliki signifikansi yang penting karena berperan aktif menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi ini membuat terwujudnya suasana yang aman dan damai, khususnya kerukunan hidup dan toleransi beragama. Karena konflik bernuansa agama cukup banyak terjadi di Indonesia, peran FKUB menjadi sangat strategis karena merupakan sarana yang baik untuk mendeteksi dini konflik sekaligus medium penyelesaiannya. Pemerintah pusat ke depannya harus mengedepankan forum ini sebagai salah satu usulan kebijakan penyelesaian konflik berskala nasional. Kelemahannya harus diakui, memang belum terlalu merepresentasikan pandangan masyarakat bawah karena yang terlibat dalam forum ini biasanya hanya tokoh atau pimpinannya saja.

Di sisi lain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menjalankan program Sapta Pesona Wisata yang sedang digalakkan pemerintah, sedangkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) menggalakkan pendidikan karakter, pendidikan agama, lengkap dengan panduannya, serta pendidikan seni dan budaya. Semua program di atas tentunya dilaksanakan dengan memperhatikan saran dan informasi serta bekerja sama dengan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) (Wisnujati, wawancara 3 April 2013).

Beberapa kebijakan khusus terkait usaha meningkatkan kondisi keharmonisan di Lombok yang sedang dilaksanakan oleh beberapa instansi merupakan upaya yang sangat signifikan. Kantor Dinas Pariwisata sedang mengupayakan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD untuk bisa menjadi Perda tentang pemberdayaan masyarakat untuk acara-acara pariwisata. Selain itu, Kantor Dinas Pariwisata juga melaksanakan penguatan budaya dengan menyiarkan kembali *gendang beleq* di tengah masyarakat yang mencerminkan kerukunan dan kerja sama antarwarga. Pemda Mataram juga memberikan keleluasaan kepada para kelompok adat untuk membentuk suatu forum yang digunakan sebagai wadah masing-masing masyarakat adat. Sementara itu, Kantor Dikpora mengadakan kegiatan budaya yang melibatkan partisipasi pemuda-pemuda daerah (Wisnujati, wawancara 3 April 2013).

Untuk keberhasilan berbagai upaya tersebut, perlu adanya visi dan misi yang dapat memberikan dorongan spirit untuk percepatan serta pencapaian kehidupan masyarakat Lombok yang harmonis. Visi dan misi yang dilakukan Kesbangpoldagri terkait dengan motto Kota Mataram, yaitu “Membangun Mataram yang Religius dan Berbudaya”. Sementara Kadisbudpar menyatakan bahwa sekarang sedang dibangun sekolah-sekolah kejuruan untuk menyiapkan SDM yang baik, pemberian kursus-kursus, sertifikasi untuk pemandu wisata dan lain-lain. Hasil kegiatan ini mungkin baru akan terasa dalam 10–15 tahun ke depan. Sementara itu, kantor Dikpora akan mengikuti kebijakan nasional dengan mengutamakan pendidikan karakter yang merupakan kurikulum mutlak dari pemerintah pusat, pembinaan karang taruna yang mulai direvitalisasikan sejak satu tahun yang lalu serta pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk kewaspadaan masyarakat (Wisnujati, wawancara 3 April 2013).

Beberapa program untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah dengan membangun komunikasi antara tokoh-tokoh agama, adat, dan pemuda melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) membuat program keserasian sosial dan program pemberdayaan kearifan lokal untuk kerukunan warga. Kantor Disbudpar melaksanakan program pendidikan karakter, pendidikan dengan muatan lokal, serta pendidikan keterampilan. Kantor Dikpora memfokuskan program pendidikan karakter, kegiatan imtaq, karang taruna, pembinaan pemuda serta pramuka. Kantor Kesbangpoldagri membuat program dengan membentuk Satgas Kewaspadaan Dini dibantu dengan kelompok Pamswakarsa seperti Lang-lang dan Bintang Mataram (Wisnujati, wawancara 3 April 2013).

Pemerintahan Kota Mataram juga membuat kebijakan dan program-program yang mendukung penguatan NKRI dalam perspektif kearifan lokal. Salah satunya adalah program keserasian sosial dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil serta program-program lainnya yang bertemakan kearifan lokal yang melibatkan seluruh etnis, agama, ataupun kelompok yang ada di Mataram sehingga mereka saling berinteraksi

untuk menimbulkan kerukunan antarmasyarakat. Di bidang pendidikan, pewujudan pendidikan karakter dan budaya adalah dengan memasukkan muatan lokal unsur-unsur kearifan lokal dan semangat bela negara ke dalam kurikulum. Hal ini karena lingkungan masyarakat heterogen sendiri masih awam terhadap kearifan lokal. Tujuannya adalah untuk bisa mengenal daerahnya sendiri dan bermanfaat untuk generasi penerus selanjutnya. Kearifan lokal yang dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal adalah berupa kesenian asli lombok (*Laporan Penelitian KKDN 2013: 43*).

Penulis menilai bahwa kearifan lokal sangatlah terkait dengan harmonisasi di dalam masyarakat. Implementasi dari kearifan lokal dapat menciptakan suatu kondisi di mana relasi antaranggota masyarakat menjadi positif. Karena itu, kondisi demikian menjadi parameter bagi terwujudnya harmonisasi. Oleh sebab itu, sejumlah usaha untuk terus membuatnya *sustainable* dilakukan oleh masyarakat-masyarakat adat yang ada. Namun, masih belum ada upaya maksimal yang dilakukan untuk mengonsolidasikan nilai-nilai kearifan lokal dari berbagai etnis yang ada agar dapat menjadi pegangan hidup pada masyarakat Kota Mataram yang heterogen.

UPAYA HARMONISASI KOTA MATARAM OLEH APARAT KEAMANAN

Adanya konflik yang beberapa kali terjadi di Lombok saat ini merupakan indikator adanya kekurangharmonisan kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan permasalahan tersendiri yang harus diantisipasi melalui upaya-upaya penumbuhan kondisi harmonis di masyarakat yang dilakukan oleh aparat keamanan. Upaya-upaya tersebut berupa program, seperti pemberian pembinaan kewilayahan oleh aparat Kepolisian kepada masyarakat, mengadakan forum komunikasi sosial yang dilaksanakan secara rutin, berkelanjutan, dan beragenda terstruktur oleh aparat teritorial TNI, serta ceramah-ceramah kepada kelompok-kelompok kecil masyarakat yang diadakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI (*Laporan Penelitian KKDN 2013: 45*).

Selain itu, pendekatan kepada tokoh masyarakat, utamanya untuk menyampaikan pesan

pemerintah untuk damai, bertoleransi dalam hidup berdampingan dalam masyarakat, dan supaya memberikan ceramah-ceramah yang menenteramkan hati dan menyejukkan suasana oleh TNI dan aparat Kepolisian juga sudah dilakukan. Bersama juga beberapa program lain, seperti pemberdayaan personel intelijen secara optimal untuk mendeteksi situasi yang berlaku dalam masyarakat, penambahan sarana dan prasarana sebagai hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menjujung pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan, pemenuhan jumlah personel yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional aparat keamanan di lapangan, pembuatan prosedur tetap untuk pelibatan satuan TNI dalam penanganan konflik, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat oleh personel Polri, peningkatan kualitas koordinasi antaraparat keamanan (*Laporan Penelitian KKDN 2013: 46*).

Program-program terkait kearifan lokal juga sudah dilakukan, seperti pembuatan *awig-awig* oleh Polri bersama Majelis Adat Sasak tentang tradisi kearifan lokal yang benar agar penyimpangan tradisi yang cenderung menyebabkan konflik dapat dihindarkan; penyuluhan kepada siswa sekolah oleh Polri melalui upacara bendera di sekolah; pendeteksian dini yang dilakukan Polda dengan menggeledah dan mengamankan musik *kecimol* (dangdut keliling) yang dianggap dapat meresahkan masyarakat, terutama dalam acara adat *nyongkolan*; intervensi yang dilakukan Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) Polda supaya *nyongkolan* tidak menggunakan *kecimol* yang mengganggu ketertiban; sosialisasi aturan main *peresean* yang benar dan disetujui bersama sebagai *awig-awig* dengan melaksanakan *Kapolda Cup* yang diselenggarakan Kepolisian/Polres/Polsek; pengamanan bersama oleh aparat Polri dan kelompok-kelompok Pam swakarsa, pemerintah membentuk FKUB dan FKPD yang mengadakan pertemuan secara rutin setiap bulan; dan melakukan pembinaan Pramuka untuk menjaga rasa nasionalisme dan kerukunan warga negara (*Laporan Penelitian KKDN 2013: 46-47*).

Menurut penulis, heterogenitas masyarakat di sana cukup memberikan peluang yang positif terkait kehidupan yang harmonis di Kota Mataram. Akan tetapi, masalah muncul ketika aparat

pemerintahan (dalam hal ini gubernur dan wali-kota/bupati, beserta jajarannya) tidak merespons dengan baik upaya-upaya pencegahan konflik. Heterogenitas seharusnya menjadi penguat kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti semboyan Bhineka Tunggal Ika. Namun, di Mataram sepertinya keberagaman yang ada tidak dikelola dengan baik oleh aparat pemerintahan.

Kurangnya perhatian ini bukan berarti akan menimbulkan potensi konflik dini, tetapi di masa yang akan datang apabila kondisi seperti ini tidak diperhatikan, dikhawatirkan akan muncul letupan-letupan kecil yang berujung pada konflik masif. Hal ini mengingatkan kecenderungan masyarakat yang heterogen untuk berkumpul dengan sesamanya lebih besar daripada keinginan untuk berbaur walaupun mereka berada dalam lingkup kesatuan Kota Mataram secara umum.

Begitu pula dengan tanggapan masyarakat terhadap upaya aparat pemerintah dalam menyosialisasikan visi dan misi mereka. Umumnya, masyarakat tidak terlalu memperhatikan, bahkan banyak yang tidak peduli dengan hal tersebut. Selama ekonomi rakyat masih berjalan stabil, tanpa ada kenaikan harga yang signifikan atau langkanya kebutuhan pokok, masyarakat Mataram sepertinya masih akan berada dalam satu lingkup kehidupan yang damai antara satu dan yang lainnya. Heterogenitas tidak akan terlalu terganggu dengan ketiadaan aparat pemerintah dalam memberi perhatian kepada masyarakat di luar urusan ekonomi sehari-hari.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan, konflik yang terjadi ketika ada kebiasaan-kebiasaan adat, seperti *merari*, *perang topat*, *nyongkolan*, bukanlah konflik yang terjadi dalam skala besar. Hampir tidak ditemukan kebencian yang mendalam antarsuku atau agama di Mataram, selain selisih paham antara pemuda yang sifatnya insidental, dan tidak terstruktur. Ketidadaan pemisahan antarsuku/agama di masyarakat terlihat dengan sering adanya kawin campur yang terjadi. Konflik yang ditimbulkan pun minim, itu pun lebih karena perbedaan-perbedaan kecil yang sifatnya temporal dan bisa diresolusi dengan segera tanpa mengakibatkan perselisihan mendalam dan panjang.

Begitu pula pengamatan penulis terhadap reaksi aparat TNI di Korem 162/Wira Bhakti dan Polda NTB terkait tindakan pencegahan konflik. Menurut pemahaman penulis, sekalipun perhatian aparat pemerintahan masih kurang, tetapi pihak Kepolisian Daerah (Polda) dan aparat keamanan lain, seperti unsur Korem sampai Babinsa, siap sedia melakukan tindakan-tindakan pencegahan konflik. Aparat keamanan di Mataram cukup memainkan fungsinya. Walaupun masih ada tumpang tindih di beberapa sektor, secara garis besar, upaya-upaya pencegahan ataupun resolusi konflik yang ada bisa dikatakan baik.

Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa peluang untuk menjalin kekeluargaan antarsuku/agama di Mataram terbuka lebar, terutama bila melihat faktor sejarah. Sudah cukup lama orang Hindu, Islam, suku Sasak, Samawa, dan Mbojo hidup berdampingan satu sama lain di Mataram. Kita tidak bisa mengesampingkan fakta ini hanya karena beberapa tahun terakhir sering terjadi kejadian-kejadian kecil yang berujung pada konflik antarsuku atau agama. Meskipun demikian, potensi konflik yang lebih besar bisa saja terjadi terkait kesenjangan ekonomi, perbedaan perlakuan, penyelewengan adat/tradisi lokal, dan sebab lain.

UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK

Semangat otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak Januari 2001 adalah pengalihan kewenangan pusat kepada daerah untuk mengelola kegiatannya secara otonom. Pengalihan kekuasaan ini diharapkan dapat mendorong proses kebijakan publik menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel serta membuat pemerintah daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika lokal (Dwiyanto 2002: 7–8). Hal yang sama tentunya berlaku juga bagi pemerintah pusat, apalagi pascapemilu presiden 2014. Ancaman utama pemerintahan baru tentunya adalah stabilitas. Untuk itu, pencegahan konflik adalah isu strategis yang harus dijadikan perhatian. Apalagi, konflik yang terjadi di Indonesia umumnya bermula dari skala lokal.

Unsur-unsur kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memahami dinamika lokal sehingga partisipasi publik

daerah pun semakin besar. Hal ini karena umumnya masyarakat daerah masih memegang teguh adat dan budaya lokal. Jika pemerintah daerah mengerti kearifan lokal yang ada di wilayahnya, dengan sendirinya partisipasi masyarakat akan meningkat. Masyarakat akan merasa diperhatikan dan dimengerti oleh pemimpinnya. Di sini, semangat otonomi daerah berperan ketika masyarakat daerah benar-benar berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik di daerahnya sendiri. Semakin terlibatnya publik dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, berarti semakin berkurangnya potensi konflik yang ditimbulkan. Dari beberapa temuan di lapangan, pemerintah Kota Mataram sudah mulai melakukan upaya-upaya seperti ini.

Kondisi ini juga bisa menjadi antitesis dari kegagalan sistem sentralisasi yang selama ini yang malah menimbulkan ancaman disintegrasi yang kuat seiring melemahnya kemampuan pusat untuk menjalankan kekuasaan secara efektif atas daerah. Misalnya, Timor Timur yang akhirnya lepas, lalu Aceh dan Papua, yang semuanya diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat (Basuni 2001: 3). Realita seperti ini dikhawatirkan akan mengancam disintegrasi bangsa. Untuk itulah pentingnya peran pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas, terutama pasca terpilihnya presiden baru. Pemerintah daerah harus mampu meredam konflik yang ada di daerahnya dengan cara mengerti dan memahami masyarakatnya. Pintu masuknya adalah budaya, yang salah satu bagiannya adalah kearifan lokal.

Itulah pentingnya teori damai dari Galtung yang menyatakan bahwa kondisi tanpa kekerasan bukan hanya bersifat personal atau langsung, melainkan juga bersifat struktural atau tidak langsung. Galtung juga menekankan bahwa kondisi damai adalah kondisi tanpa kekerasan dan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat. Jika kondisi ini dapat terwujud, niscaya konflik tidak akan terjadi.

Ketika masyarakat daerah memiliki partisipasi yang tinggi, kegiatan ekonomi juga terkena dampaknya. Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan pembangunan daerah berbasis pemberdayaan ekonomi, yang antara lain meliputi pengembangan kemitraan ekonomi

dan pemberdayaan ekonomi rakyat (Noor 2012: 18–19). San Afri Awangi, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, menjelaskan mengenai substansi ekonomi kerakyatan yang mensyaratkan adanya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Selain itu, kegiatan pembentukan dan pembagian hasil produksi nasional harus di bawah pimpinan dan pengawasan masyarakat (Noor 2012: 35–36). Karena itu, pelaksanaan otonomi daerah sangat koheren dengan semangat ekonomi kerakyatan, yang membuat masyarakat daerah mandiri, bahkan mampu berswasembada.

Arbi Sanit pun mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat utama dalam mengimplementasikan desentralisasi dan otonomi daerah di mana pembangunan mulai tahap perencanaan hingga pengawasan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mendorong proses demokratisasi berjalan lancar dengan prinsip dasar partisipasi, kontrol, transparansi, dan akuntabilitas. Pemberdayaan masyarakat dalam deskripsi yang dimaksud merupakan upaya untuk mentransformasikan segenap potensi pertumbuhan masyarakat menjadi kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan (Sanit 1998: 32). Selain itu, juga tentunya sebagai upaya pencegahan konflik yang sangat esensial bagi pemerintahan baru Indonesia pasca-SBY.

Sebagai basis dari kehidupan masyarakat maka penguatan ekonomi rakyat, di samping pematangan budaya dan pemantapan agama, adalah langkah mendasar untuk memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi dan nilai itu berguna bagi kemandirian serta penguatan posisi tawar masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan negara (Sanit 1998: 32–33).

Dengan tidak adanya konflik dalam skala besar di Mataram, daerah ini berpotensi untuk mampu mencapai kemandirian ekonomi sehingga masyarakat akan berdaya dengan sendirinya. Cukup banyaknya masyarakat di Mataram yang masih menjalankan kearifan lokalnya, proses integrasi otonomi daerah akan berjalan semakin baik karena kegiatan ekonomi praktis tidak terganggu. Daerah-daerah seperti Papua dan Aceh,

praktis mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, sekalipun kearifan lokal daerahnya cukup terpelihara. Akan tetapi, intensitas konflik yang terjadi secara tidak langsung menghambat integrasi antara otonomi daerah dan kearifan lokal di sana.

Karena itulah, integrasi antara otonomi daerah dan kearifan lokal sangat berkorelasi dengan pemberdayaan masyarakat, terlebih di bidang ekonomi. Jika ekonomi berjalan baik, rakyat pun sejahtera, otomatis konflik pun tidak terjadi. Akan tetapi, apabila hal itu diabaikan dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam pembangunan. Bahkan, kasus seperti Aceh dan Papua yang menuntut kemerdekaan bisa saja terjadi lagi karena mereka merasa diabaikan oleh pemerintah pusat. Hal ini sangat penting dan strategis bagi calon Presiden Indonesia nantinya untuk menjaga harmonisasi kehidupan masyarakatnya.

Walaupun seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki pemimpin, masih saja ada daerah yang miskin atau tidak diperhatikan. Karena itulah, otonomi daerah memerlukan kearifan lokal. Harus ada transformasi paradigma kemajemukan dan multikulturalisme dengan kearifan lokal masing-masing ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Semangat otonomi daerah bukanlah egosentrisme, tetapi bagaimana daerah mampu mandiri dalam mengatur masalah rumah tangganya sendiri sehingga mampu meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal harus jadi bagian dari budaya bangsa yang dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan.

Pewujudan pendidikan karakter dan budaya dengan memasukkan muatan lokal tentang unsur-unsur kearifan lokal dan semangat bela negara ke dalam kurikulum adalah sebuah upaya yang sangat kreatif. Kearifan lokal yang dipadukan dengan semangat bela negara membuat semangat persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga serta upaya pencegahan konflik berjalan efektif. Kondisi ini baiknya terjadi ketika unsur lokal menjadi raja di rumahnya sendiri.

Secara khusus di Mataram, upaya aktif dalam menjaga tegaknya NKRI juga dilakukan oleh aparat keamanan melalui pengiriman aparat yang selalu berinteraksi dan bersosialisasi dengan

masyarakat setempat. Satu contoh, seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Angkatan Darat yang ada di desa-desa di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Disebutkan bahwa NTB memiliki 1.014 desa sehingga seorang Babinsa akan bertanggung jawab untuk membina satu desa meskipun sering terkendala dengan terbatasnya biaya operasional untuk menjalankan tugas, fasilitas serta luasnya wilayah tugas (Yansori, wawancara 2 April 2013).

Komando Resor Militer (Korem) memiliki fungsi teritorial dan subfungsi bidang yang menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Contoh kegiatan yang mengoptimalkan kearifan lokal di masyarakat adalah mengadakan ceramah atau seminar yang diperuntukkan bagi tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat, dan pemuda, tentang wawasan kebangsaan, wawasan nasional, dan ketahanan nasional selain pembentukan karakter (Yansori, wawancara, 2 April 2013). Sementara itu, Kepolisian Daerah NTB melakukan kegiatan upacara bendera yang dilakukan serentak dengan polisi sebagai inspektur upacara di sekolah-sekolah dalam rangka sosialisasi keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Hal yang dianggap paling penting adalah mengenai narkoba dan minuman keras (Suwanto, wawancara 4 April 2013).

Permasalahan yang ada di pemerintahan, baik desa, kecamatan, kabupaten/kotamadya, hingga provinsi, masih kurang memiliki kesadaran untuk menghidupkan kembali fungsi Lang-lang secara adat di daerah mereka. Sebagai akibatnya, fungsi Lang-lang sangat kecil dibandingkan desa yang belum menerapkan Lang-lang. Di Kota Mataram sendiri, dengan bantuan dari walikota, komunitas Lang-lang yang dibentuk telah beranggotakan sebanyak 400 orang. Kerja sama antarlembaga daerah yang menyangkut bela negara dan dilaksanakan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah masih secara normatif bersifat simbolis (Wisnujati, Wawancara 3 April 2013).

PENUTUP

Kearifan lokal memiliki potensi besar dalam proses harmonisasi masyarakat. Kearifan lokal yang ada di seluruh suku bangsa di Indonesia

ini tidak boleh hilang atau punah karena ia akan menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya daerah, di mana budaya nasional adalah pengejawantahan dari budaya-budaya daerah. Dengan kata lain, penguatan unsur-unsur kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat daerah, tentunya di bawah supervisi dan bimbingan pemerintahan daerah akan sangat berguna bagi upaya pencegahan konflik.

Memang sampai saat ini kita menghadapi masalah terkait kepincangan kekuatan antara pusat dan daerah sehingga dapat menjadi ancaman bagi negara serta tidak menjamin kelangsungan pertumbuhan negara. Kepincangan seperti itu harus dijawab dengan mengubah aksentuasi atau polarisasi kekuatan. Pembagian kekuasaan harus pula diberikan kepada daerah karena tujuan nasional adalah bagian dari tujuan pemerintah daerah. Karena itulah, jika segenap aparatur daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan baik, basis pemerintahan nasional akan semakin baik, dan integrasi nasional tetap terjaga. Kearifan lokal di sini memegang peranan penting, baik sebagai salah satu unsur budaya yang ada di masyarakat maupun sebagai elemen penting pemersatu bangsa yang dimulai dari daerah. Sebagai anak bangsa, marilah kita semua berkomitmen untuk membangun negara kita, dimulai dari membangun daerah.

Semangat otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak Januari 2001 adalah pengalihan kewenangan pusat kepada daerah untuk mengelola kegiatannya secara otonom. Pengalihan kekuasaan ini diharapkan dapat mendorong proses kebijakan publik menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta membuat pemerintah daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika lokal. Hal yang sama tentunya berlaku juga bagi pemerintah pusat, apalagi pascapemilu presiden 2014. Ancaman utama pemerintahan baru tentunya adalah stabilitas. Untuk itu, pencegahan konflik adalah isu strategis yang harus dijadikan perhatian. Apalagi, konflik yang terjadi di Indonesia umumnya bermula dari skala lokal. Kebijakan yang akan dihasilkan pemerintahan baru kelak harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini.

Unsur-unsur kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memahami dinamika lokal sehingga partisipasi publik daerah pun semakin besar. Hal ini karena umumnya masyarakat daerah masih memegang teguh adat dan budaya lokal. Jika pemerintah daerah mengerti kearifan lokal yang ada di wilayahnya, dengan sendirinya partisipasi masyarakat akan meningkat. Masyarakat akan merasa diperhatikan dan dimengerti oleh pemimpinnya. Di sini, semangat otonomi daerah berperan ketika masyarakat daerah benar-benar berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik di daerahnya sendiri. Semakin terlibatnya publik dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, semakin berkurangnya potensi konflik yang ditimbulkan. Dari beberapa temuan di lapangan, pemerintah Kota Mataram sudah mulai melakukan upaya-upaya ini.

Partisipasi masyarakat mendorong kelancaran proses demokratisasi dengan prinsip dasar partisipasi, kontrol, transparansi, dan akuntabilitas. Pemberdayaan masyarakat dalam deskripsi dimaksudkan sebagai upaya untuk mentransformasikan segenap potensi pertumbuhan masyarakat menjadi kekuatan nyata masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di segenap aspek kehidupan. Selain juga, tentunya sebagai upaya pencegahan konflik yang sangat esensial bagi pemerintahan baru Indonesia pasca-SBY.

Oleh karena itu, integrasi antara otonomi daerah dan kearifan lokal sangat berkorelasi dengan pemberdayaan masyarakat, terlebih di bidang ekonomi. Jika ekonomi berjalan baik, rakyat pun sejahtera, otomatis konflik tidak terjadi. Akan tetapi, apabila diabaikan hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam pembangunan. Bahkan, kasus seperti Aceh dan Papua yang menuntut kemerdekaan bisa saja terjadi lagi karena mereka merasa diabaikan oleh pemerintah pusat. Sisi ini sangat penting dan strategis bagi calon Presiden Indonesia nantinya untuk menjaga harmonisasi kehidupan masyarakatnya. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah pusat harus memperhatikan *local content* sehingga konflik karena ketidakpuasan tidak kembali terjadi dan kondisi “damai positif” bisa terlaksana dengan baik.

PUSTAKA ACUAN

- Amirrachman, A. 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta: International Center for Islam and Pluralism (ICIP) and European Commission (EC).
- Avruch, K. 1998. *Culture and Conflict Resolution*. Washington, DC.: United States Institute of Peace Press.
- Basuni, B. 2001. *Kontrol Publik dalam Otonomi Daerah: Sebuah Partisipasi bukan Provokasi*. Yogyakarta: Pusat Studi Pembangunan Regional (PUSPER).
- Castro, L. N., & J. N. Galace. 2010. *Peace Education: Pathway to A Culture of Peace*. Cuezon City: Centre of Peace Education.
- Dwiyanto, A, dkk. 2002. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Laporan Penelitian Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN). 2013. *Kearifan Lokal untuk Harmonisasi Kehidupan Masyarakat dalam Perspektif Bela Negara: Studi Kasus Kota Mataram*. Program Studi Peace and Conflict Resolution, Universitas Pertahanan Indonesia. Makalah tidak diterbitkan.
- Nihin, A. D. 1999. *Paradigma Baru Pemerintahan Daerah Menyongsong Milenium Ketiga*. Palangkaraya: PT Mardi Mulyo.
- Noor, I. 2012. *Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI*. Jakarta: Seven Strategic Studies.
- Pandebaik. 2011. Pecalang Perangkat Keamanan Panutan Desa Adat Bali. Diakses dari <http://www.pandebaik.com/2011/03/02/pecalang-perangkat-keamanan-panutan-desa-adat-bali/> pada tanggal 18 Juni 2013.
- Ridwan, N. A. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 5 No.1, Jan–Jun 2007, P3M STAIN Purwokerto.
- Sanit, A. 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Webel, C., & Galtung, J. 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge.
- Zulkarnain, A. 2010. *Tradisi dan Adat Istiadat Samawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Empirik Mengamati Folklore Masyarakat Sumbawa)*. Sumbawa Besar: Pajenang.

Wawancara

- Aryadi, L. G. 2013, 1 April. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Kadisbudpar) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Wawancara Personal.
- Puziati. 2013, 2 April. Direktur Program Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik NTB. Wawancara Personal.
- Saleh, A. 2013, 1 April. Tokoh Masyarakat Dompu. Wawancara Personal.
- Suwarto. 2013, 4 April. Direktur Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda NTB . Wawancara Personal.
- Wisnujati, B. 2013, 3 April. Kepala Kesatuan Bangsa, Politik, dan Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Pemerintah Kota Mataram. Wawancara Personal.
- Yansori, E. 2013, 2 April. Kepala Seksi Operasi Korem 162/Wira Bhakti. Wawancara Personal.
- Yudana, I. G. H., Sujana, K. M., & Ardhana, I. M. 2013, 4 April. Pecalang Sikep. Wawancara Personal.